



## BUPATI BEKASI

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya Klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaga Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Tahun 2020);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 48).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bekasi.
8. Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.
15. Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten.

16. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengolah seluruh arsip aktif yang tercipta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.
18. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
19. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
20. Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang berkedudukan pada Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
21. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
22. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
23. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
24. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
25. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
26. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
27. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
28. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif

bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

29. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
30. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
31. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
32. Pengguna Internal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
33. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
34. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otoritas legal pemanfaatan informasi publik.
35. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.
36. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.

## Bab II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. Tersedianya pedoman penggunaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi; dan
- b. Terselenggaranya pelayanan penggunaan arsip secara efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, serta Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis.

### BAB III

## KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

### Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
- b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. Setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

### Bagian Kesatu

#### Kategori Arsip

##### Paragraf 1

#### Arsip Biasa

### Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Daerah meliputi Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian Organisasi, Bagian Perlengkapan, Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Arsip dinamis dari Perangkat Daerah lainnya.

## Paragraf 2

### Arsip Terbatas

#### Pasal 6

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa seperti dokumen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

## Paragraf 3

### Arsip Rahasia

#### Pasal 7

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum seperti kasus atau sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dokumen lainnya.

## Paragraf 4

### Arsip Sangat Rahasia

#### Pasal 8

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam kategori arsip sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum seperti kasus atau sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan dokumen lainnya.

#### Pasal 9

Penetapan tingkat klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Pengamanan Arsip Dinamis

##### Pasal 10

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filling cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

##### Pasal 11

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan Pengelola Arsip Aktif di *Central File* masing-masing Unit Pengolah.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggungjawab mengelola arsip di *Central File* dan/atau di *Records Center*.

##### Pasal 12

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

### Bagian Ketiga

#### Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip

##### Pasal 13

- (1) Klasifikasi Keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman dalam pengaturan akses arsip dinamis.
- (2) Pengaturan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Pengaturan akses arsip aktif dan arsip inaktif dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, dimuat dalam Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah masing-masing; dan
- b. Pengaturan akses arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dimuat dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif terhitung 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 7 Desember 2020

**BUPATI BEKASI,**

Ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 7 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

  
**UUU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 117

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 117 TAHUN 2020

TANGGAL : 07 DESEMBER 2020

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
ARSIP DINAMIS

NO.	JENIS/SERIES ARSIP.	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
A.	<b>Penyusunan Rencana Pembangunan</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan				
	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah				
	- Rencana Pembangunan Tahunan				
	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)				
B.	<b>Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang</b>				
1.	Musrenbang Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Musrenbang Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
C.	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Renstra	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
3.	Penyusunan Program Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	
	Berkas kegiatan penyusunan program tahunan meliputi:				
a.	Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya				
b.	Program Kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)				
c.	Program Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten				
<b>D.</b>	<b>Penyusunan Kontrak Kinerja</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
a.	Kontrak Kinerja Eselon IV dan III				
b.	Kontrak Kinerja Eselon II				
<b>E.</b>	<b>Penyusunan Laporan</b>				
1.	Berkala	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
a.	Laporan Triwulan				
b.	Laporan Semesteran				
c.	Laporan Tahunan Unit Kerja				
d.	Laporan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)				
e.	Laporan Tahunan Kabupaten				
f.	Laporan Indikator Kinerja Utama Kabupaten				
g.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten				
2.	Laporan Insidental OPD/Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	
<b>F.</b>	<b>Evaluasi Program</b>				
1.	Unit Kerja Setingkat Eselon IV dan III	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Laporan Evaluasi Unit Kerja Setingkat Eselon IV dan III				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Unit Kerja Setingkat Eselon II	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Laporan Evaluasi Unit Kerja Setingkat Eselon II				
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Laporan Evaluasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten				
G.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
-	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi				
H.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
-	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I.	<b>Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Laporan Hasil Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Perencanaan Pembangunan				
J.	<b>Penyusunan Rencana Aksi Strategis Daerah</b>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
1.	Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah				
2.	Hasil Rapat pembahasan rancangan awal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	
3.	Hasil Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)				
4.	Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah				
5.	Perencanaan aksi strategis daerah yang sudah ditetapkan				
K.	<b>Perencanaan Pendanaan Pembangunan</b>				
1.	Pendanaan Luar Negeri dan Hibah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas hasil kegiatan perencanaan pendanaan luar negeri dan hibah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Pendanaan Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Unit pengolah terkait
	Berkas hasil kegiatan perencanaan pendanaan dalam negeri				
3.	Kerja Sama Pembangunan Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Unit pengolah terkait
	Berkas hasil kegiatan perencanaan pendanaan dalam negeri				
4.	Pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Unit pengolah terkait
	Berkas hasil kegiatan perencanaan pendanaan dari surat berharga syariah negara				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5.	Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Unit pengolah terkait
	Berkas hasil kegiatan perencanaan pendanaan on top dan atau inisiatif baru				
	<b>HUKUM</b>				
A.	<b>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	-				
	Usul Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan				
	-				
	Bahan/materi Program Legislasi Daerah dari Instansi Daerah				
	-				
	Program Legislasi Instansi Daerah				
B.	<b>Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>				
1.	<b>Penyusunan Peraturan Daerah</b>				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a.			Perencanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1)			Naskah Akademik Peraturan Daerah (PERDA)				
	2)			Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)				
	3)			Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan				
	4)			Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di instansi Pengusul				
	5)			Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)				
	6)			Keterangan Jawaban Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)				
	b.			Pembahasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1)			Permohonan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)				
	2)			Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3)			Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan draft akhir			
	c.			Penetapan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	Unit pengolah terkait
	1)			Pemberian paraf oleh lembaga terkait			
	2)			Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul			
	3)			Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan			
	d.			Pengundangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	Unit pengolah terkait
	-			Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah			
	-			Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah			
	-			Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah			
	-			Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah			
2.	Penyusunan Keputusan/Penetapan			Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a.			Keputusan/Surat Edaran/Instruksi			
	1)			Keputusan Pimpinan Pemerintah Daerah:			
				- Pengajuan draf dari unit pengusul			
				- Telaah hukum			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Perbaikan draf				
	- Penetapan				
<b>C.</b>	<b>Publikasi Peraturan Perundang-Undangan</b>				
	Berkas kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan				
<b>D.</b>	<b>Penyusunan Naskah Kerja Sama</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Dokumen usulan prakasa dari lembaga/unit kerja				
	- Hasil konsultasi dan koordinasi				
	- Hasil Rapat interdep/antar unit				
	- Draf/Counter draf				
	- Hasil penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/pemarafan				
	- Draf final				
	- Naskah kerja sama yang disahkan				
<b>E.</b>	<b>Pengelolaan Dokumentasi Hukum</b>				
	Dokumentasi produk hukum dan database Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
F.	Penyusunan Uji Materi Peraturan Perundang-undangan/Opini Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Pengajuan permohonan				
-	Pendaftaran				
-	Penjadwalan sidang				
-	Pemeriksaan Pendahuluan				
-	Pemeriksaan Persidangan				
-	Putusan				
G.	Pemberian Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sanggah				
-	Bantuan/Konsultasi Hukum Pidana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	-			Bantuan/Konsultasi Hukum Perdata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	-			Bantuan/Konsultasi Hukum PTUN dan Agama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
H.	Penanganan Permasalahan Hukum				Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	-			Penanganan permasalahan kontrak				
	-			Keterangan ahli				
i.	KEPEGAWAIAN							
A.	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara							

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Perencanaan Kebutuhan ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Perencanaan Kebutuhan ASN terdiri dari:				
	a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan				
	b. Analisis Kebutuhan				
	1) Aparatur Sipil Negara				
	2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
	c. Pengolahan data kebutuhan				
2.	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Perencanaan Pertimbangan Formasi meliputi:				
	a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN				
	b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas				
3.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4.	Standarisasi Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen Standarisasi Jabatan terdiri dari:				
	a. Informasi Jabatan				
	b. Kompetensi Jabatan				
	c. Klasifikasi Jabatan				
<b>B.</b>	<b>Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai</b>				
1.	Penyusunan Formasi ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas penyusunan Formasi ASN meliputi:				
	a. Usulan formasi disertai dengan:				
	1) Analisa Jabatan				
	2) Beban Kerja				
	b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN				
	c. Persetujuan Formasi				
	d. Penetapan Formasi				
	e. Penetapan Formasi Khusus				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pengadaan ASN meliputi Dokumen/Hasil Kegiatan berikut:				
	a.	Proses Rekrutmen ASN			
	b.	Penetapan Pengumuman Kelulusan			
	c.	Berkas Lamaran yang tidak diterima			
	d.	Nota Usul Pengangkatan ASN			
	e.	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)			
3.	Penyusunan Sistem Rekrutmen ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas penyusunan sistem rekrutmen ASN meliputi dokumen/hasil				
	a.	Pengelolaan sistem rekrutmen			
		1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai			
		2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi			
		3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi				
	1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar				
	2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi				
	3) Sertifikasi dan pelaporan				
	-				
	-				
<b>C.</b>	<b>Mutasi Pegawai</b>				
1.	Alih Status/Pindah Instansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4.	Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan, hukum pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
6.	Pelaksanaan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>D.</b>	<b>Pengembangan Karir</b>				
1.	Pelaksanaan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian				
a.	Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Pelaksanaan				
	c. Pelaporan				
	d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan				
2.	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Penyusunan sistem karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Berkas pengajuan Angka Kredit meliputi:				
	a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit				
	b. Penetapan Angka Kredit				
<b>E.</b>	<b>Penilaian Kinerja</b>				
1.	Penyusunan Sistem Penilaian dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja meliputi dokumen/hasil				
	a. Sistem Penilaian Kinerja ASN				
	b. Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN				
	c. Penilaian Kinerja Pegawai ASN				
2.	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja				
	a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN				
	b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN				
	c. Teknis penilaian kinerja ASN				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>F.</b>	<b>Pembinaan Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN</b>				
1.	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Disiplin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Disiplin meliputi: .				
a.	Penegakan Disiplin				
b.	Peningkatan Disiplin				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Pemberhentian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pemberhentian terdiri dari:				
	a. Pemberhentian dengan hormat				
	b. Pemberhentian tidak dengan hormat				
	c. Pemberhentian sementara				
4.	Pensiun	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara				
	1) Administrasi pensiun ASN				
	2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun				
	b. Penetapan Pensiun ASN				
	c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN				
	d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya				
	1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat)				
	2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab)				
	3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara (BKN)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
G.	Pemberian Bantuan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
H.	<b>Pengelolaan Status dan Kedudukan Pegawai</b>				
1.	Penyusunan Pertimbangan status kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pertimbangan Status Pegawai meliputi Dokumen/Hasil Kegiatan				
	a. Analisis status kepegawaian				
	b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian				
2.	Penyusunan Pertimbangan kedudukan kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pertimbangan kedudukan kepegawaian meliputi Dokumen/Hasil				
	a. Analisis kedudukan kepegawaian				
	b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Penyelesaian keberatan pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Penyelesaian Perselisihan/sengketa kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>				
1.	Pengolahan data dan informasi kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pengolahan data dan informasi kepegawaian meliputi				
a.	Pengolahan Data				
	Pengelolaan database kepegawaian ASN				
	Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN				
b.	Informasi kepegawaian				
	1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi				
	2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi				
	3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian meliputi:				
a.	Arsip kepegawaian elektronik				
	1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian				
	2) Perekaman dan arsip kepegawaian				
	3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik				
b.	Arsip Kepegawaian Fisik				
<b>J.</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian</b>				
1.	Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Formasi, pengadaan dan pasca diklat meliputi Dokumen/Hasil				
a.	Pelaksanaan peraturan perundang-undangan				
b.	Monitoring dan Evaluasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
2.	Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian meliputi				
	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan				
	b. Monitoring dan Evaluasi				
	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
3.	Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja meliputi				
	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan				
	b. Monitoring dan Evaluasi				
	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
4.	Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN meliputi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan				
	b. Monitoring dan Evaluasi				
	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
5.	Pelaporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
6.	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honoror	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
K.	<b>Administrasi Pegawai</b>				
1.	Administrasi Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Administrasi Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Administrasi Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Administrasi Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Dokumentasi Identitas Pegawai meliputi:				
a.	Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu				
b.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				
	d. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				
6.	Pengurusan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
7.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
L.	Layanan Kesejahteraan Pegawai				
1.	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Layanan Tabungan Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Layanan Bantuan Sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Layanan Pemberian Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Pegguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
6.	Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7.	Pemberian Tali Kasih	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
8.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
9.	Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
10.	Layanan Medical Cek Up	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>M.</b>	<b>Administrasi Perseorangan</b>				
1.	Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:				
	a.	Berkas Lamaran yang diterima			
	b.	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya			
	c.	Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN			
	d.	SK Pengangkatan CASN			
	e.	Hasil Pengujian Kesehatan			
	f.	Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan			
	g.	SK Pengangkatan ASN			
	h.	SK Peninjauan Masa Kerja			
	i.	SK Kenaikkan Pangkat			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
j.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan				
k.	SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan				
l.	SK Perpindahan Wilayah Kerja				
l.	SK. Perpindahan Antar Instansi				
m.	SK. Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
n.	Berita Acara Pemeriksaan				
o.	SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin ASN				
p.	SK Perbantuan / Dipekerjakan di luar Instansi Induk				
q.	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan / Dipekerjakan				
r.	SK Pemberian Uang Tunggu				
s.	SK Pembebasan dari Jabatan Organik diangkat sebagai Pejabat				
t.	SK Pengalihan ASN				
u.	SK Pemberhentian Sebagai ASN				
w.	Surat Keterangan Pernyataan Hilang				
x.	Surat Keterangan Kembali ASN yang dinyatakan Hilang				
y.	SK Penggantian Nama				
z.	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran				
aa.	Akta Nikah / Cerai				
bb.	Akta Kelahiran				
cc.	Isian Formulir PUASN				
dd.	Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ASN dan Jabatan				
ee.	Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol / Ormas/ LSM				
ff.	Surat Keterangan Mutasi Keluarga				
gg.	Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan				
	ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional				
	jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus				
	kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala				
	ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri				
	mm. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri				
	nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf ) ASN				
	oo. Ijazah/Sertifikat				
	pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai				
	qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk				
	rr. Surat Pertimbangan Status ASN				
	ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN				
	tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena				
	uu. SK. Pensiun				
2.	Berkas perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang				
	a. Bupati dan Wakil Bupati				
	b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	c. Ketua, wakil ketua, dan anggota KPUD/BAWASLU				
4.	Berkas Perseorangan Kepala Desa				
<b>N.</b>	<b>Penilaian Kompetensi</b>				
1.	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Pengelolaan Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>V.</b>	<b>ORGANISASI</b>				
<b>A.</b>	<b>Analisis Struktur Organisasi</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen berupa struktur organisasi hasil dari kegiatan:				
	a. Pembentukan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Perubahan				
	c. Pembubaran				
B.	Analisis Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
C.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
D.	Analisis Tata Laksana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen berupa analisis tata laksana hasil dari kegiatan:				
	a. Prosedur Tetap				
	b. Mekanisme Kerja				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
E.	<b>Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen berupa Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana hasil dari				
	a. Evaluasi Struktur Organisasi				
	b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi				
	c. Evaluasi Uraian Jabatan				
	d. Uraian Tata Laksana				
	<b>KEUANGAN</b>				
A.	<b>Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>				
1.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) meliputi				
	a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas				
	1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				
	2) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)				
	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah				
	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya				
	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Nota Kesepakatan PPA				
	f. Prioritas Plafon Anggaran				
2.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah (RKA-SKPD/PD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat				
	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-PD yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	b. Dokumen RKA-SKPD/PD				
3.	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
	a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan				
	1) Nota Keuangan Pemerintah				
	2) Materi RAPBD				
	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)				
	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya				
	e. Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya				
	f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD				
	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya				
	h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD				
4.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				
	Berkas Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan meliputi:				
	1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan				
	a) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)				
	b) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah				
	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan				
	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya				
	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan				
	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Berkas Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja				
	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/OPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	2) Dokumen RKA-SKPD/PD Perubahan				
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Berkas Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan				
	1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan				
	a) Nota Keuangan Pemerintah				
	b) Materi RAPBD				
	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat				
	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan				
	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya				
	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya				
	6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan				
	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya				
	8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan				
<b>B.</b>	<b>Penyusunan Anggaran</b>				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD/OPD				
	- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/OPD yang telah				
<b>C.</b>	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>				
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
a.	Pendapatan Asli Daerah				
1)	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)				
2)	Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain:				
	a) Pajak Hotel				
	b) Pajak Restoran				
	c) Pajak Hiburan				
	d) Pajak Reklame				
	e) Pajak Penerangan Jalan				
	f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan				
	g) Pajak Parkir				
	h) Pajak Air Tanah				
	i) Pajak Sarang Burung Walet				
	j) PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan				
	k) Bea perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)				
	l) Pajak kendaraan bermotor				
3)	Surat Keetapan Retribusi Daerah/Perda tentang Retribusi Daerah				
4)	Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain:				
	a) Retribusi Jasa Umum				
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan				
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil				
	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	- Retribusi Pelayanan Pasar				
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
	- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan				
	b) Retribusi Jasa Usaha				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	-	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
	-	Retribusi Tempat Pelelangan			
	-	Retribusi Terminal			
	-	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
	-	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa			
	-	Retribusi Penyedotan Kakus			
	-	Retribusi Rumah Potong Hewan			
	-	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal			
	-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
	-	Retribusi Penyeberangan di atas air			
	-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair			
	-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	c)	Retribusi Perizinan Tertentu			
	-	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
	-	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	-	Retribusi Izin Gangguan			
	-	Retribusi Izin Trayek			
	d)	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas			
	e)	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			
	5)	Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat			
	6)	Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
	7)	Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum			
	8)	Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
	9)	Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank			
	b.	Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:			
	1)	Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten				
	3) Dana Alokasi Umum (DAU)				
	4) Dana Perimbangan Daerah yang tidak menerima DAU				
	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)				
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah: Berkas Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah				
	1) Alokasi Dana Penyesuaian				
	2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah				
	3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi				
	4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
	5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga				
	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)				
	e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah				
	g. Dokumen Piutang Daerah				
	h. Dokumen Pengelolaan Investasi				
2.	Pelaksanaan Belanja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Belanja terdiri dari:				
	a. Dokumen Belanja Langsung				
	- Belanja Pegawai				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Belanja Barang Jasa				
	- Belanja Modal				
	b. Dokumen Belanja Tidak Langsung				
	- Pegawai				
	- Hibah				
	- Belanja Bagi Hasil				
	- Subsidi				
	- Bunga				
	- Bantuan sosial				
	- Bantuan keuangan				
	- Belanja tidak terduga				
3.	Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas pembiayaan daerah terdiri dari:				
	a. Bukti Penerimaan Pembiayaan				
	- SILPA				
	- Dana Cadangan				
	- Dana Bergulir				
	- Pinjaman Daerah				
	- Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD				
	b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan				
	- Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir				
	- Penyertaan Modal pada BUMD				
	- Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD				
	- Pengeluaran dari Dana Cadangan				
	- Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)				
4.	Penatausahaan Keuangan				
	Bekas Dokumen Penatausahaan Keuangan terdiri dari:				
	a. Surat Penyediaan Dana (SPD)				
	b. Surat Permohonan Pembayaran (SPP)				
	c. Surat Perintah Membayar (SPM)				
	d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				
5.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Pertanggungjawaban Pengguna Dana terdiri dari:				
	a. Buku Kas Umum (BKU)				
	b. Buku Kas Pembantu (BKP)				
	c. Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek				
	d. Rekening Koran Bank				
	e. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi				
	f. Bukti penyetoran Pajak				
	g. Register Penutupan Kas				
	h. Berita Acara Pemeriksaan				
	i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan				
	j. Laporan Pendapatan Negara/Daerah				
	k. Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK
6.	Penatausahaan Gaji	Terbatas	Penerbitan, Kelembagaan, Penerimaan, Internal, Eksternal, Pengendalian
	- Daftar Gaji		
	- Kartu Gaji		
	- Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BLUD)		
7.	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Biasa/Terbuka	Penggunaan, Sistem
	a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
	b. Neraca		
	c. Laporan Perubahan Saldo Lebih		
	d. Laporan Operasional		
	e. Laporan Arus Kas		
	d. Laporan Perubahan Ekuitas		
	g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		
D.	Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penerbitan, Kelembagaan, Penerimaan, Internal, Eksternal, Pengendalian
1.	Pengajuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penerbitan, Kelembagaan, Penerimaan, Internal, Eksternal, Pengendalian
	- Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)		
	- Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6.	Penatausahaan Gaji	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Daftar Gaji				
	- Kartu Gaji				
	- Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)				
7.	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
	b. Neraca				
	c. Laporan Perubahan Saldo Lebih				
	d. Laporan Operasional				
	e. Laporan Arus Kas				
	d. Laporan Perubahan Ekuitas				
	g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				
D.	Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
1.	Pengajuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )				
	- Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Green Book</i> )				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya				
	- Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>				
	- Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar				
2.	Perencanaan dan Penggunaan Pinjaman.Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana				
	b. Data Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya :				
	1) <i>Reimbursement</i>				
	2) <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i>				
	3) <i>Special Commitment/ L/C Opening</i>				
	4) <i>Special Account/Imprest Fund</i>				
	c. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )				
	d. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM (Surat Perintah Membayar) beserta lampirannya, antara lain: SPP (Surat Perintah				
	e. Dokumen <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL),				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. (PHLN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:				
	a. Kuasa Pengguna Anggaran				
	b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa				
	c. Pejabat Pembuat Komitmen				
	d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji				
	e. Pejabat Penandatanganan SPM				
	f. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran				
	g. Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan				
4.	Pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. <i>Staff Appraisal Report</i>				
	b. <i>Report/Laporan yang terdiri dari:</i>				
	1) <i>Progress Report</i>				
	2) <i>Monthly Report</i>				
	3) <i>Quarterly Report</i>				
	c. Laporan Hutang Daerah :				
	1) Laporan Pembayaran Hutang Daerah				
	2) Laporan Posisi Hutang Daerah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. <i>Completion Report/Annual Report</i>				
<b>E.</b>	<b>Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi				
	c. Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi				
	d. Data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulan/Semesteran				
<b>F.</b>	<b>Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan</b>				
	1. Penetapan penugasan penyaluran anggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan				
	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :				
	1) SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-				
	2) Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3) Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara				
	c. Buku Rekening Bank				
	d. Keputusan Pembukuan Rekening				
2.	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya				
	b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll.				
3.	Pembukuan anggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku				
G.	Pengelolaan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari				
a.	Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu				
b.	Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu				
c.	Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Bawalu Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas/Bawaslu				
d.	Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu				
e.	Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten				
f.	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas/Bawaslu Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
g.	Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada				
h.	Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
i.	Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	<b>Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda/Bawaslu dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu				
	- Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu				
	- Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro				
	- Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
	- Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya				
3.	<b>Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
	c. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
<b>H.</b>	<b>Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Desa</b>				
1.	Penyusunan Rencana Anggaran Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)				
	b. Program Kerja Desa				
	- Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa				
	- Rencana Kerja Perangkat Desa				
	c. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa				
2.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Bukti Pungutan Desa				
	b. Dokumen pelepasan Eks Tanah Kas Desa				
	1) Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa				
	2) Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3) Hasil persetujuan/rapat				
	4) Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah				
	5) Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas				
	6) Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa				
	7) Pembelian Tanah Pengganti				
	8) Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti				
	9) Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pelepasan Tanah				
	10) Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa				
	c. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa				
	1) Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi				
	2) Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	d. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa				
	1) Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas				
	2) Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah				
	3) Ijin tertulis Gubernur				
	e. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong/Kaur				
	f. Dokumen Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
	g. Pembukuan Kas Desa				
	1) Buku Kas Umum				
	2) Buku Bantu Pengeluaran				
	h. Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa				
3.	Pelaporan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Laporan Keuangan Kas Desa (Bulanan, Triwulan, Semesteran)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Laporan Keuangan Tahunan Desa				
I.	<b>Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah</b>				
1.	Penyusunan Rencana Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	Berkas Rencana Pengawasan terdiri dari:				
	a. Rencana Strategis Pengawasan				
	b. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan				
	c. Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan				
	d. Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan				
	e. Rakor Pengawasan				
2.	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Berkas Hasil Pelaksanaan Pengawasan meliputi Dokumen/Hasil				
	a. Audit				
	1) Hasil audit yang tidak berskala nasional				
	- Hasil Audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
	- Hasil Audit terhadap pemanfaatan Aset daerah				
	- Hasil Audit terhadap program/kegiatan strategis di bidang				
	- Hasil Audit terhadap pembiayaan pembangunan daerah				
	- Hasil Audit Investigasi terhadap penyimpangan yang				
	- Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Hasil Audit Lainnya				
2)	Hasil Pengawasan				
	- Hasil Pengawasan dan Pembinaan Tahunan kepada bupati/walikota				
b.	Hasil Reviu				
1)	Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan instansi				
2)	Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah				
3)	Hasil pelaksanaan reviu atas Penyusunan Anggaran instansi				
c.	Hasil Evaluasi				
1)	Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
2)	Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Aset Daerah				
3)	Hasil Evaluasi terhadap program/kegiatan strategis dibidang				
4)	Hasil Evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan daerah				
5)	Hasil Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan				
6)	Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan				
7)	Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah				
8)	Hasil Evaluasi penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha				
d.	Hasil Pemantauan/Monitoring				
1)	Hasil Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK)				
2)	Hasil Monitoring Penyerapan Anggaran				
3)	Hasil Pemantauan/Monitoring Lainnya				
e.	Hasil Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Sosialisasi				
1)	Hasil Pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				
2)	Hasil Asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja				
3)	Hasil Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan				
<b>/I.</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>				
<b>A.</b>	<b>Pengelolaan Barang</b>				
1.	Inventarisasi Barang:	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi barang antara lain				
	a. Barang Bergerak				
	b. Barang Tidak Bergerak				
2.	Distribusi Barang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen berupa distribusi dari kegiatan:				
	a. Barang Pakai Habis				
	b. Barang Bergerak				
	c. Barang Tidak Bergerak				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Pemeliharaan Barang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Administrasi Pergudangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan Aset</b>				
1.	Pengelolaan Bukti Kepemilikan Aset	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Bukti-Bukti Kepemilikan Gedung/ Bangunan meliputi: Sertifikat				
	b. Bukti-Bukti Kepemilikan Barang Bergerak, Meliputi Kendaraan				
2.	Penghapusan aset	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
II.	<b>KERUMAHTANGGAAN DAN KETATAUSAHAAN</b>				
A.	<b>Pengurusan Administrasi Telekomunikasi</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
B.	<b>Pengurusan Perjalanan Dinas</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen kegiatan perjalanan dinas hasil kegiatan dari:				
	a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
	b. Perjalanan Dinas Luar Negeri				
C.	<b>Pengelolaan Fasilitas Kantor</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
D.	Penyelenggaraan Rapat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Rapat Pimpinan Eselon II dan III				
	b. Rapat Staf				
E.	Pengelolaan Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
F.	Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen pengurusan kendaraan dinas hasil kegiatan dari:				
	a. Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas				
	b. Pemeliharaan dan Perbaikan				
	c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
G.	Pemeliharaan Gedung dan Taman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	Dokumen pemeliharaan gedung dan taman hasil kegiatan dari:				
	a. Pertamanan/ <i>Landscaping</i>				
	b. Penghijauan				
	c. Perbaikan Gedung				
	d. Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma				
	e. Kebersihan Gedung dan Taman				
H.	Pengelolaan Jaringan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Perbaikan/ Pemeliharaan				
	b. Pemasangan				
I.	Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Daftar Nama Satuan Pengamanan				
	b. Daftar Jaga/ Daftar Piket				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Catatan Gangguan/Pelanggaran/Kejadian				
	d. Surat Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang				
	e. Laporan Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Kehilangan				
	2) Kerusakan				
	3) Kecelakaan				
	4) Gangguan				
J.	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
K.	Administrasi Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	<b>PENGADAAN</b>				
A.	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa				
	b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan				
	c. Penetapan Kebijakan Umum				
	d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				
	e. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
<b>B.</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan</b>				
1.	Pemilihan Penyedia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Persiapan Pemilihan Penyedia				
	1) Kaji ulang pengadaan				
	2) Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis				
	3) Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
	4) Menetapkan rancangan kontrak				
	5) Menyusun dokumen pengadaan				
	b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia				
	1) Pengumuman				
	2) Pendaftaran				
	3) Penjelasan pekerjaan				
	4) Pemasukan dan pembukaan penawaran				
	5) Evaluasi penawaran				
	6) Penetapan dan pengumuman pemenang				
	7) <i>e-Purchasing</i>				
	8) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak				
a.	Penandatanganan Kontrak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)				
	2) Kontrak				
	3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)				
b.	Pelaksanaan Kontrak				
	1) Laporan Pelaksanaan				
	2) Berita Acara Serah Terima (BAST)				
3.	Pelaksanaan Swakelola	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
a.	Perencanaan				
b.	Pelaksanaan				
c.	Pengawasan dan evaluasi				
C.	Pengembangan Strategi dan Sistem Pengadaan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Pengembangan Strategi Pengadaan Umum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Barang dan jasa				
	1) Barang dan jasa lainnya				
	2) Jasa Konsultansi				
	b. Pekerjaan Konstruksi				
	1) Pelaksana Konstruksi				
	2) Perencana dan Pengawas Konstruksi				
2.	Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha				
	1) Kemitraan infrastruktur				
	2) Kemitraan non infrastruktur				
	b. Badan usaha dan keadaan khusus				
	1) Badan usaha				
	2) Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Pengembangan Sistem Katalog	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Riset dan kontrak				
	1) Riset Pasar dan Industri				
	2) Kontrak payung				
	b. Pengelolaan katalog				
	1) Pengendalian pelaksanaan katalog				
	2) Evaluasi katalog				
4.	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi				
	1) Pengembangan aplikasi SPSE				
	2) Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE				
	b. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik				
	1) Bimbingan Teknis LPSE				
	2) Monitoring dan Evaluasi LPSE Daerah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
D.	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengadaan</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Pelaksanaan kebijakan pengadaan				
	b. Kinerja pelaksanaan pengadaan				
K.	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>				
A.	<b>Penyelenggaraan Keprotokolan</b>				
1.	Penyelenggaraan Acara Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Penyelenggaraan Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri				
	Dokumen berupa kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri hasil				
	a. Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/ Instansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Kunjungan Dinas Pejabat Lain/ Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Penyusunan Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	-   Agenda kegiatan pimpinan daerah				
<b>B.</b>	<b>Dokumentasi</b>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>C.</b>	<b>Penyajian Informasi Kelembagaan</b>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	Dokumen penyajian informasi kearsipan hasil dari kegiatan				
	a.   Kliping Koran				
	b.   Brosur/ Leaflet/ Poster/ Plakat				
	c.   Pengumuman/Pemberitaan				
<b>D.</b>	<b>Hubungan Antar lembaga dan Pemerintah Daerah</b>				
1.	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
3.	Hubungan dengan Perusahaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
4.	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
5.	Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
6.	Hubungan dengan Media Massa :				
	Dokumen kegiatan media massa dari hasil kegiatan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a. Siaran Pers/konferensi Pers/Press release	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Kunjungan Wartawan/Peliputan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. Wawancara	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>E.</b>	<b>Rapat Dengar Pendapat/Hearing DPRD Kabupaten</b>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>F.</b>	<b>Publikasi</b>				
1.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
3.	Pameran/ Sayembara/ Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>G.</b>	<b>Pemberian Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan/Ucapan</b>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>K.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
A.	Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Penyusunan Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Akreditasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
a.	Institusi penilai				
b.	Program/institusi yang dinilai				
3.	Penyusunan Kurikulum dan Modul	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Sistem Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5.	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
6.	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>B.</b>	<b>Pembinaan Widyaiswara</b>				
1.	Seleksi dan Pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Konsultasi, Advokasi dan Asistensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
6.	Sistem Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
C.	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>				
1.	Perencanaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
5.	Sistem informasi diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6.	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
a.	Penyelenggaraan Diklat				
b.	Pasca Diklat				
7.	Pengelolaan Data Alumni	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
D.	<b>Pelaporan Statistik Penyelenggaraan Diklat</b>				
a.	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Laporan Statistik Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>XI.</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
<b>A.</b>	<b>Pembinaan Kearsipan</b>				
1.	Akreditasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)				
	Berkas akreditasi Lembaga Kearsipan Daerah meliputi dokumen/hasil				
	a. Proses Akreditasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikat Akreditasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Sertifikasi Arsiparis				
	Berkas sertifikasi arsiparis meliputi dokumen/hasil kegiatan:				
	a. Proses Sertifikasi Arsiparis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3.	Bina Arsiparis				
	Berkas bina arsiparis meliputi dokumen/hasil kegiatan berikut:				
	a. Pengembangan Profesi Arsiparis				
	1) Formasi Jabatan Arsiparis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	2) Standar Kompetensi Arsiparis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. Penilaian Arsiparis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Berkas Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)				
	2) Berkas Penetapan Angka Kredit (PAK) Arsiparis				
	d. Pemilihan Arsiparis Teladan				
	Berkas pemilihan arsiparis teladan meliputi dokumen/hasil kegiatan				
	1) Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	2) Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	e. Pengelolaan Data Base Arsiparis				
4.	Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan				
	Berkas bimbingan dan konsultasi meliputi dokumen/hasil kegiatan berikut:	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan				
	c. Pembinaan Unit Kearsipan				
	d. Pembinaan Sumber Daya Manusia				
5.	Supervisi dan Evaluasi Kearsipan				
	Berkas supervisi dan evaluasi meliputi dokumen/hasil kegiatan berikut:	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Perencanaan				
	b. Pelaksanaan				
	c. Laporan Tahunan Supervisi dan Evaluasi				
6.	Pengelolaan Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Database Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi				
7.	Fasilitasi Kearsipan				
	Berkas kegiatan fasilitas kearsipan meliputi dokumen hasil kegiatan:	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Fasilitasi SDM Kearsipan				
	b. Fasilitasi Prasarana dan Sarana				
8.	Penilaian Organisasi Kearsipan (LKD/Unit Kearsipan) Teladan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Berkas penilaian organisasi kearsipan(LKD/Unit Kearsipan) teladan meliputi dokumen/hasil kegiatan berikut:	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Penyelenggaraan				
	b. Penetapan/penghargaan Organisasi Kearsipan teladan				
9.	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip				
	a. Berkas Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Database Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>				
1.	Penciptaan Arsip				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a. Pencatatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Buku Agenda				
	- Kartu Kendali				
	- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi				
	b. Pendistribusian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Penggunaan Arsip				
	a. Daftar Arsip sesuai Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Daftar Peminjaman Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Pemeliharaan Arsip Dinamis				
	a. Pemberkasan				
	- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Penataan Arsip Inaktif	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Pengaturan fisik				
	- Pengolahan informasi arsip				
	- Penyusunan daftar arsip inaktif				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Penyimpanan arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif				
	- Pengamanan				
	d. Alih Media Arsip Dinamis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Kebijakan alih media				
	- Autentikasi				
	- Berita acara				
	- Daftar arsip yang dialihmediakan				
	e. Program Arsip Vital Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Identifikasi				
	- Pelindungan dan pengamanan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Penyelamatan dan pemulihan				
	- Daftar Arsip Vital				
4.	Autentikasi Arsip Dinamis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen Pembuktian Autentisitas				
	b. Opini/Pendapat tenaga ahli				
	c. Dokumen Pengujian				
	d. Penetapan autentisitas arsip/surat pernyataan Pencipta Arsip				
5.	Penyusutan Arsip				
	a. Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Berita acara Pemindahan				
	- Daftar arsip yang di pindahkan				
	b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Pembentukan Panitia penilai				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Surat pertimbangan Panitia Penilai				
	- Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga				
	- Penetapan arsip yang dimusnahkan				
	- Berita Acara Pemusnahan Arsip				
	- Daftar arsip yang dimusnahkan				
c.	Penyerahan arsip statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Pembentukan Panitia Penilai				
	- Notulen Rapat Panitia				
	- Surat pertimbangan Panitia Penilai				
	- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan				
	- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat				
	- Keputusan Penetapan Penyerahan				
	- Berita Acara Penyerahan Arsip				
	- Daftar arsip yang diserahkan				
6.	Pengelolaan Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
a.	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>C.</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis</b>				
1.	Akuisisi				
	a. Monitoring fisik dan daftar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	b. Verifikasi terhadap daftar arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	c. Menetapkan status arsip statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
d.	Persetujuan untuk Penyerahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
e.	Penetapan arsip yang diserahkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
f.	Berita Acara Penyerahan Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
g.	Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Pengumpulan Sejarah Lisan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Berkas sejarah lisan meliputi:	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan				
	b. Hasil Wawancara Sejarah Lisan				
	- Berita Acara wawancara Sejarah Lisan				
	- Laporan Kegiatan				
	- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip				
3.	Pencarian Arsip Statis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Daftar Pencarian Arsip Statis				
	b. Pengumuman				
	c. Akuisisi daftar pencarian arsip statis				
	d. Penghargaan dan Imbalan				
4.	Pengolahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Menata Informasi				
	b. Menata Fisik				
	c. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik				
	- Guide khasanah dan/atau guide tematik				
	- Daftar Arsip Statis				
	- Inventaris Arsip Statis				
5.	Preservasi Arsip				
	Berkas preservasi meliputi dokumen dan hasil kegiatan:				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
a.	Preventif	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
1)	Alih Media Arsip Dinamis				
-	Berita Acara Alih Media				
-	Berita Acara Alih Media				
-	Daftar Arsip yang dialih mediakan				
2)	Pengendalian hama terpadu				
3)	Penyimpanan				
b.	Kuratif	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
1)	Perawatan Arsip				
c.	Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
6.	Autentikasi Arsip Statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
a.	Pembuktian Autentisitas				
b.	Pendapat tenaga ahli				
c.	Hasil Pengujian				
d.	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan				
7.	Layanan Akses Arsip Statis				
a.	Dokumen Layanan Arsip	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
b.	Penerbitan Naskah Sumber/Sumber Sejarah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	- Hasil naskah sumber arsip				
c.	Dokumen Kegiatan Pameran arsip	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>D.</b>	<b>Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)</b>				
	Berkas pengelolaan JIKN dan SIKN meliputi:				
a.	<i>Database</i> arsip daerah yang masuk simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
b.	<i>Database</i> arsip daerah yang masuk simpul jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>II.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
<b>A.</b>	<b>Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi</b>				
1.	Layanan Deposit Bahan Pustaka				
	Berkas layanan deposit bahan pustaka meliputi dokumen/hasil kegiatan				
a.	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
b.	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
c.	Bibliografi dan Katalog	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	1) Bibliografi Daerah (BD)				
	2) Katalog Induk Daerah (KID)				
	3) Katalog Dalam Terbitan (KDT)				
	d. Pendaftaran Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	e. Pendaftaran Nomor <i>International Standard Music Number (ISMN)</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Pengembangan Koleksi				
	Berkas pengembangan koleksi meliputi dokumen/hasil kegiatan berikut:				
	a. Akuisisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Unit pengolah terkait
	1) Pembelian				
	2) Hibah				
	3) Hadiah				
	4) Tukar Menukar				
	5) Implementasi Undang-Undang KCKR				
	6) Terbitan Internal				
	7) Pendistribusian bahan pustaka surplus				
	8) Inventarisasi koleksi (Buku Induk)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Pengolahan Bahan Pustaka	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Pangkalan Data Katalog Koleksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	Berkas kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi meliputi hasil				
	a. Keanggotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Sirkulasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. Referensi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	e. Kerja Sama Perpustakaan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	1) <i>MoU</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	2) Perjanjian kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Pengembangan situs web				
	2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia				
	3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan				
	4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
4.	Preservasi Bahan Pustaka				
	Berkas preservasi bahan pustaka meliputi dokumen/hasil kegiatan:				
	a. Konservasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	1) Perawatan Bahan Perpustakaan				
	2) Perbaikan Bahan Perpustakaan				
	3) Penjilidan Bahan Perpustakaan				
	b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. Transformasi Digital	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	d. Kurasi Digital	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>B.</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan</b>				
1.	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca				
	Berkas pengembangan perpustakaan dan pengkajian minat baca				
	a. Pengembangan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	1) Perpustakaan Umum				
	2) Perpustakaan Khusus				
	3) Perpustakaan Sekolah				
	b. Akreditasi Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	1) Permintaan akreditasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2) Pemberian akreditasi				
c.	Pangkalan Data Perpustakaan				
	1) Nomor Pokok Perpustakaan				
	2) Perpustakaan Berbasis Wilayah				
d.	Pemasyarakatan Minat Baca	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
e.	Organisasi Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	1) Forum Perpustakaan Umum				
	2) Forum Perpustakaan Khusus				
	3) Forum Perpustakaan Sekolah				
	4) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca				
	5) Organisasi Perpustakaan Lainnya				
2.	Pengembangan Pustakawan				
	Bekas kegiatan pengembangan pustakawan meliputi dokumen/hasil				
a.	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
b.	Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
c.	Penerbitan Jurnal (Master)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
d	Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Tim Penilai Instnasi/Perpustakaan Nasional				
	2) Tim Penilai Pusat				
e.	Pemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
f.	Evaluasi Tenaga Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	h. Pangkalan data Tim Penilai Perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
iii.	<b>PENDIDIKAN</b>				
A.	<b>Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</b>				
1.	Penyelenggaraan PAUD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen Penyelenggaraan program				
	- Uji kompetensi				
	- Penilaian dan Penetapan Kinerja lembaga pendidikan usia dini				
	b. Bahan ajar				
	c. Pelatihan				
	d. <i>Block Grant</i>				
	e. Sosialisasi				
	f. Peringatan hari anak nasional				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	Pendidikan masyarakat				
a.	Dokumen Penyelenggaraan program	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Bahan ajar				
	- Penyusunan majalah				
b.	Dokumen Pemberian bantuan sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Penilaian proposal				
	- Pemberian bansos				
c.	Dokumen Pembinaan program	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Temu koordinasi				
	- Bintek program/pendampingan				
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan				
d.	Dokumen penyelenggaraan lomba, penghargaan, dan anugerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
e.	Dokumen penyelenggaraan peringatan Hari Anak Internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
f.	Dokumen penyelenggaraan Pameran/publikasi/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
3.	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan				
a.	Dokumen Penyelenggaraan program	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Uji kompetensi (akreditasi)				
	- Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan				
	- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan				
	- Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra				
b.	Dokumen Pemberian Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
c.	Dokumen Pembinaan Program: Bintek, Orientasi Teknis, dan Temu Karya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
d.	Standar kursus dan pelatihan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Kurikulum				
	- Bahan ajar				
e.	Dokumen Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
f.	Dokumen Penyelenggaraan Publikasi dan Promosi Kursus	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
g.	Dokumen Penyelenggaraan Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
4.	Pengelolaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
a.	Bahan ajar	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
b.	Block grant	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
c.	Sosialisasi (modul)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
d.	Data pendidik dan tenaga kependidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
e.	Data Induk Siswa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
B.	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Dasar</b>				
1.	Penyelenggaraan Sekolah Dasar				
a.	Kurikulum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
b.	Bahan ajar	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
c.	Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
d.	<i>Block grant</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
e.	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
f.	Lomba, sayembara, dan festival	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
g.	Bantuan operasional sekolah [BOS]	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
h.	Bantuan siswa miskin	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
i.	Data Induk Siswa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
2.	Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
a.	Kurikulum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
b.	Bahan ajar	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	d. <i>Block grant</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	e. Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	f. Lomba, sayembara, dan festival	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	g. Bantuan operasional sekolah [BOS]	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	h. Bantuan siswa miskin	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	i. Data Induk Siswa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
3.	Penyelenggaraan Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK				
	a. Bahan ajar	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Petunjuk teknis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. <i>Block grant</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	d. Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	e. Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	g. Alat bantu pembelajaran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	h. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	i. Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Unit kesehatan sekolah				
	- Pendidikan jasmani adaptif				
	- Pendidikan inklusi				
	- <i>Block grant</i>				
	- Bimbingan teknis/sosialisasi				
	- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore				
4.	Pengelolaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Pendataan dan pemetaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b.	Pembinaan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	c.	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	d.	Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	e.	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	g. <i>Block grant</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	h. Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	i. Data Induk Siswa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
<b>C.</b>	<b>Pembinaan Kurikulum</b>				
1.	Pelaksanaan Pembinaan kurikulum				
	- Dokumen pelaksanaan pembinaan kurikulum pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	Evaluasi penyusunan kurikulum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Laporan Evaluasi Penyusunan Kurikulum				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
D.	Pengadaan Buku Pelajaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Penyusunan standar mutu buku				
	b. Pengumpulan naskah				
	c. Penilaian mutu buku dan pemilihan				
	d. Persetujuan dan pengesahan naskah				
	e. Penerbitan/pencetakan				
	f. Master buku/naskah yang dicetak				
	g. Distribusi buku				
	h. Pengembangan naskah				
	i. Pengkajian buku				
E.	Penilaian Pendidikan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	Penilaian akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Dokumen pelaksanaan penilaian akademik				
2.	Penilaian non akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Dokumen pelaksanaan penilaian non akademik				
3.	Analisis dan sistem informasi penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
-	Dokumen hasil analisa dan sistem informasi penilaian				
<b>F.</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>				
1.	Pengembangan dan pelindungan				
a.	Dokumen Hasil Pengkajian	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik		Unit pengolah terkait
	1) Bahasa				
	2) Sastra				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Dokumen Hasil Pembakuan dan perlindungan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen Pengelolaan Informasi dan publikasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
2.	<b>Pembinaan dan pemasyarakatan</b>				
	a. Dokumen Pelaksaaan Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Pelaksanaan Bantuan teknis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
3.	<b>Pembelajaran</b>				
	a. Dokumen Proses pembelajaran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
4.	<b>Peningkatan dan pengendalian</b>				
	a. Dokumen Kegiatan Peningkatan fungsi dan peran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Pengendalian penggunaan bahasa	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
<b>G.</b>	<b>Pengembangan SDI/ Pendidikan serta Penjaminan Mutu</b>				
1.	<b>Pengembangan profesi pendidik</b>				
	a. Dokumen Pelaksanaan Peningkatan kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan				
	2) Pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar				
	3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Dokumen Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan				
	2) Pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar				
	3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah tingkat				
2.	Pengembangan tenaga kependidikan				Unit pengolah terkait
	a. Program	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik		
	1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik				
	2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai				
	b. Hasil Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik				
	2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai				
3.	Penjaminan mutu pendidikan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a. Dokumen Pemetaan mutu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal				
	2) Penjaminan mutu pendidikan dasar				
	3) Penjaminan mutu pendidikan menengah tingkat pertama				
	b. Dokumen Pengelolaan Sistem informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal				
	2) Penjaminan mutu pendidikan dasar				
	3) Penjaminan mutu pendidikan menengah tingkat pertama				
4.	Penyusunan Panduan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman				
	- Proposal/TOR/KAK				
5.	Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Dokumen penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6.	Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	- Dokumen Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi				
7.	Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Dokumen Penyaluran block grant pascabencana				
8.	Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal serta publik	-	Unit pengolah terkait
	- Dokumen penyelenggaraan				
H.	<b>Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan</b>				
1.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	a. Dokumen Perancangan dan produksi				
	b. Dokumen Penyiaran dan pengendalian				
2.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait